

**ANALISA PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN
DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi(SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh

Nama : Mhd. Fajar Hidayat
NPM : 1405180031
Program studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

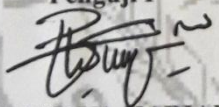
MEMUTUSKAN

Nama : MHD. FAJAR HIDAYAT
NPM : 1405180031
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISA PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

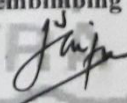
Penguji I


Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

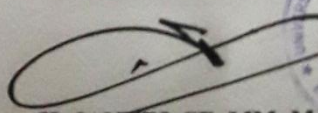
Penguji II


HASTINA FEBRIANTY, SE, M.Si

Pembimbing

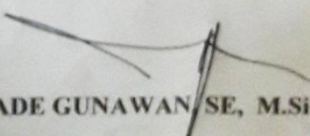

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Ketua


H. JANURI, SE, MM, M.Si

Panitia Ujian

Sekretaris


ADE GUNAWAN, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mhd. Fajar Hidayat
NPM : 1405180031
Konsentrasi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Perpajakan/Manajemen/EP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 8... Februari. 2018
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MHD. FAJAR HIDAYAT
N.P.M : 1405180031
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISA PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012-2016

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20-03-2018	- Analisis lebih dalam lagi setiap data yg ditampilkan, terutama nilai tertinggi dan terendah. Cari mengapa amelan	J hu	
22-03-2018	- Coba rumus data dgn mengubah posisi variabel bebas dan terikat. Bandingkan dgn hasil sebelumnya. - Buat dan analisis uji hipotesis nya	J hu	
24-03-2018	- Rangkai ke teori hasil interpretasi data yg diperoleh - Buat kesimpulan secara dg masalah penelitian - Tertahai koreksi yg ada	J hu	
26-03-2018	- Telah selesai diperbaiki dan all sudah sudah	J hu	

Medan, 26 Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MHD. FAJAR HIDAYAT
N.P.M : 1405180031
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISA PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN 2012-2016

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si

ABSTRAK

MHD. FAJAR HIDAYAT. NPM 1405180031. Analisa Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016.

Dalam skripsi ini, mengangkat judul “Analisa Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016”. Topik ini diangkat berdasarkan perkembangan-perkembangan pendapatan daerah yang terjadi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Tujuan utama peneliti ini adalah untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variabel-variabel pertumbuhan ekonomi/ produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel , dimana data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut yang dihimpun pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016.

Berdasarkan hasil dari regresi (*estimasi*) dengan metode regresi berganda menggunakan *software E-views8*. Menyatakan bahwa pada nilai R-Square (R^2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) model ini diperoleh senilai 93,2%. Variabel-variabel tersebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi(PE) dan Jumlah Penduduk (JP) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Segala pujian hanya milik ALLAH SWT. Pujian dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisa Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016**” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dan penulis juga tidak perna lupa kepada junjungan Nabi Muhammad SAW , utusan ilahi untuk mengatur dua alam semesta ini. Dengan kehadiran beliau kita bisa hidup dalam beragama islam secara sempurna, dan dalam kehidupan yang terang benderang seperti yang sama sama kita rasakan.

Skripsi ini dipersembahkan terkhususnya kepada kedua orang tua ku, ayahanda MHD. YUSUF dan ibunda MARIANA yang telah memberikan doa dan dukungan yang penuh kasih sayang, spiritual, moral,dan material yang takakan ternilai. Mereka mampu mendidik dan membesarkan anak-anaknya hingga kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga ridho anak menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Berkat doa dan restu mereka sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami berbagai kendala, rintangan, cobaan, ujian, yang dialami saat menyusun skripsi ini, namun berkat bimbingan,

dukungan dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Jainuri, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Ibu DR. Prawidya Hariani, M,Si, selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu, mengajarkan, mengarahkan, membimbing, serta memberika masukan kepada penulis.
4. Ibu Roswita Hafni, SE, M,Si, selaku Seketaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Hj. Lailan Safina HSB, MS,i selaku Dosen Pembimbing skripsi saya, dan selaku Dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak/ Ibu Dosen mata kuliah Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah banyak mengajarkan penulis selama penulis dalam proses belajar di perkuliahan.
7. Bapak/ Ibu Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan.
8. Saudara tercinta abang Chandra Sopyan, Mujiono, SPd, kakak Lidiyana, SPd, M. Riko, Riyan, Yutika Putri, Mulya, Muliadi, Purwadi, Aji, Yogi, dan Adik Khadizah Az- Zahra
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang juga sedang berusaha mendapatkan gelar sarjananya yaitu Dwi Prabowo, Hendri Kurniawan, Baladil Komala, Rasid Ridho, Muammar Rizky, Adnan Khasogi, Pino riza Andika, Zulhadi, Reza Pahlevi,

Solahuddin, Solihin, Fariz Rizky, M. Ihklan, Agung Putra, M. Zainudduin, Satria Perdana, Rahmat Gustiadi, Reza Kurniawan, Fariz, Arif, Siti Suharni, Riana Astuty, Sari Handayani, Cristy Wijawanty, Tika Rahmadityanti, Retno serlinda, Mia Audina, Rizky Ananda, Windiya, Nida Afifah, Octaviani, Desi Ardila, Hasnatul, Fitri, Nurul, Suci, Wita Pradita, Lidya Novia, Sonia Hariati, Yuthika Sarah, dan lain-lain teman saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. yang telah berkerja keras selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.

10. Teman-teman EP A&B 2014 dan 2015 yang sedang berjuang tanpa menyerah sehingga memotivasi penulis untuk selalu melakukan yang terbaik.
11. Seluruh pihak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Seluruh bantuan yang tidak ternilai harganya ini dapat saya balas satu persatu, semoga ALLAH SWT membalasnya sebagai amal ibadah dan akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Amin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

Medan, April 2018

Penulis

MHD. FAJAR HIDAYAT

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR KURVA	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	18
1.3. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	19
1.3.1. Batasan Masalah	19
1.3.2. Rumusan Masalah.....	19
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1.4.1 Tujuan Penelitian	19
1.4.1. Manfaat Penelitian	20
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
2.1. Uraian Teoritis	21
2.1.1. Teori Penerimaan Negara	21
a. Penerimaan Perpajakan.....	21
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	22
2.1.2. Penerimaan Daerah	23
1. Pendapatan Asli Daerah	23
2. Dana Perimbangan	25

2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi	29
A. Teori Klasik Adam Smith	30
B. Teori Neo Klasik	31
C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes	34
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Kerangka Konseptual.....	39

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian	41
3.2. Definisi Operasional	41
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6. Tahapan Analisis Data	42
3.6.1. Analisis Deskriptif	43

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran umum Provinsi Sumatera Utara	45
4.1.1. Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara	45
4.1.2. Luas Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara	46
4.1.3. Topografis Wilayah Provinsi Sumatera Utara	46
4.1.4. Kondisi Iklim Provinsi Sumatera Utara	47
4.2. Deskripsi Data.....	47
4.2.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016	47
1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Bagian Pantai Barat	49
2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Bagian Pantai Timur	52

3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Bagian Daratan Tinggi .	55
4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Bagian Menidang.....	57
4.2.3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2016.....	60
1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bagian pantai barat	61
2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bagian pantai timur	63
3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bagian dataran tinggi	65
4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bagian Mebidangro.....	66
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016	5
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016	8
1.3. Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara	15
2.1. Penelitian Terdahulu	38
3.2. Defenisi Operasional	41

DAFTAR KURVA

2.1. Kurna Jumlah Penduduk Optimal	30
2.2. Kurva Tingkat Pertumbuhan Stabil	32
2.3. Kerangka Konseptual.....	40

DAFTAR GRAFIK

4.1. Pendapatan Asli Daerah dipantai barat Sumatera Utara	49
4.2. Pendapatan Asli Daerah dipantai timur Sumatera Utara	52
4.3. Pendapatan Asli Daerah didaratan tinggi Sumatera Utara.....	55
4.4. Pendapatan Asli Daerah Mebidang Sumatera Utara.....	58
4.5. Pertumbuhan Ekonomi dipantai barat Sumatera Utara.....	61
4.6. Pertumbuhan Ekonomi dipantai timur Sumatera Utara	63
4.7. Pertumbuhan Ekonomi didaratan tinggi Sumatera Utara	65
4.8. Pertumbuhan Ekonomi di Mebidang Sumatera Utara	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dan masih tahap Pembangunan yang secara signifikan, akan tetapi dengan pembangunan tersebut Negara Indonesia juga membutuhkan dana yang lebih untuk memberlanjutkannya pembangunan-pembangunan yang ada di seluruh Indonesia. Karena pembangunan nasional ini adalah suatu rangkaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan ekonomi merupakan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat mengalami peningkatan. Dimana kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi harus dipahami sebagai suatu proses multi dimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas dasar struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi Nasional, disamping itu tetap mengejar perubahan pertumbuhan ekonomi, penangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat, telah melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi dan lembaga, memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Adapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan disemua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti : makan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan

2. Peningkatan standar hidup, bukan hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian yang besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial, yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kekukungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara-bangsa lain. Tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan. (Todaro, 2006).

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dengan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan negara. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek : Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, terhadap keberlanjutan untuk mengacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sasaran umum pembangunan ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap, terciptanya lapangan kerja yang memadai bagi penurunan pengangguran. Serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditempuh berbagai program pembangunan terpadu, salah satunya mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan membangkitkan sektor riil agar menciptakan lapangan kerja. Dengan kebijakan ini kegiatan ekonomi akan lebih terdorong untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, (Najihah, 2013).

Di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa fenomena kemiskinan dan ketimpangan menjadi isu serius bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Yang pertama, selama pemerintah Orde Baru, Indonesia mencatat laju pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen pertahunnya. Yang menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu mencapai laju pertumbuhan yang relatif tinggi. Yang kedua, Tetapi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan perbaikan dalam distribusi pendapatan, dan pola ketimpangan di Indonesia tidak banyak mengalami penurunan.

Dampak ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat dengan meningkatnya aliran dana dari pusat ke daerah yaitu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang diasosiasikan dengan bertambahnya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Daerah berpendapat bahwa bila mereka diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri keuangan mereka, maka pertumbuhan ekonomi di daerah akan lebih tinggi dibandingkan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan cara yang terpusat (*Sentralisasi*), karena sumber daya mereka besar.

Pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Oleh karena itu identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran pemerintah. Di Indonesia sektor pemerintah memiliki peran besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah Indonesia memiliki dua instrumen utama yaitu, perpajakan dan pengeluaran.

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting, kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (*share*)

terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Mengingat pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional. Yang sudah diyakini serta diterapkan secara luas, pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Todaro, 2000).

Bisa dilihat pada table 1.1 laju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dari Provinsi Aceh sampai Papua, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan angka 5,02 persen, yang dengan angka tersebut, rakyat Indonesia menjadi sejahtera.

Table 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2016

No	Provinsi	2016
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	3,3 %
2.	Sumatera Utara	5,2%
3.	Riau	2,2%
4.	Sumatera Barat	5,5%
5.	Jambi	4,4%
6.	Bengkulu	5,3%
7.	Sumatera Selatan	5,0%
8.	Lampung	5,2%
9.	Kepulauan Riau	5,0%
10.	Bangka Belitung	4,1%
11.	Banten	5,3%
12.	DKI Jakarta	5,9%
13.	Jawa Barat	5,7%
14.	Jawa Tengah	5,3%
15.	Yogyakarta	5,1%
16.	Jawa Timur	5,6%
17.	Bali	6,2%
18.	Nusa Tenggara Barat	6,8%
19.	Nusa Tenggara Timur	5,2%
20.	Kalimantan Barat	5,2%
21.	Kalimantan Tengah	6,4%
22.	Kalimantan Selatan	4,4%
23.	Kalimantan Timur	-0,2%
24.	Kalimantan utara	3,8%

25.	Sulawesi Utara	6,2%
26.	Sulawesi Tengah	10,0%
27.	Gorontalo	6,5%
28.	Sulawesi Barat	6,0%
29.	Sulawesi Selatan	7,4%
30.	Sulawesi Tenggara	6,5%
31.	Maluku	5,8%
32.	Maluku Utara	5,8%
33.	Papua	9,2%
34.	Papua Barat	4,2%
Indonesia		5,02%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari data pada table 1.1. dapat dilihat bahwa sanya Negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil diangka 5,02 % dari total Produk Domestik Bruto. Adapun daerah-daerah di Indonesia yang memiliki tingkat Pertumbuhan Ekonominya yang tinggi, bisa dilihat pada data diatas pada Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, bisa dilihat apabila suatu Negara atau Daerah yang apabila pertumbuhan ekonominya tinggi pasti kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi diangka 10,0%. Dan Provinsi Papua memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi juga tinggi berkisaran pada angka 9,2 %. Pada Provinsi Sulawesi Selatan juga tinggi berkisaran pada angka 7,4%. Akan tetapi dibalik daripada tingginya pertumbuhan ekonomi didaerah-daerah lain ada juga daerah yang mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonominya yang rendah. Yaitu antara lain pada Provinsi Kalimantan Timur mengalami minus dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalimantan Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah dari seluruh jumlah Provinsi tiga puluh empat Provinsi yang ada di Indonesia yaitu berkisaran diangka -0,2%. Selanjutnya juga disusul dengan Provinsi Riau yang pertumbuhan ekonominya juga rendah yaitu diangka 2,2 %. Pada pembahasan penelitian ini peneliti mengambil pembahasan di Provinsi Sumatera Utara. Dimana Provinsi Sumatera Utara tingkat pertumbuhan ekonominya mengalami kestabilan pada angka 5,2 % dari total Produk Domestik Regional Bruto.

Mengingatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di seluruh daerah-daerah Indonesia itu juga tidak luput dari pertumbuhan ekonominya, sebab apabila suatu daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, maka kita sudah yakin bahwasanya perekonomian suatu daerah tersebut akan makmur dan rakyatnya juga sejahtera, di Indonesia pertumbuhan ekonominya saat ini masih dibidang sangat stabil dengan nilai angka 5,02 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Utara bisa kita lihat bahwa Provinsi Sumatera Utara ini memiliki Pertumbuhan Ekonomi yang stabil yaitu berkisaran 5,10 % dari total pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami naik turun (*fluktuasi*) setiap tahunnya, sehingga membuat perekonomian di Provinsi Sumatera Utara tidak stabil dan lambat, yang membuat pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan dengan lancar. Inilah fenomena yang sering dihadapi dalam setiap daerah, kerana tidak setiap tahunnya suatu daerah yang makmur itu terus mengalami kenaikan yang terus signifikan dalam setiap tahunnya pendapatan dan laju pertumbuhan ekonomi, dan begitu sebaliknya daerah yang belum makmur.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah keinginan masing –masing daerah bahkan negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi seperti : sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagaian tenaga kerja, dan skala produksi. Sedangkan faktor non ekonomi seperti : sosial, manusia, politik dan administratif.

Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode atau biasanya satu tahun. Maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ketahun,

apakah Laju Pertumbuhan Ekonomi nya naik atau turun (*fluktuasi*). Bisa kita lihat pada tabel

1.1 sebagai berikut :

Table 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2016

Kabupaten/Kota		Pertumbuhan Ekonomi	
		2015	2016
Kabupaten/ Regency		(1)	(2)
1	Nias	5,43	5,03
2	Mandailing Natal	6,22	6,20
3	Tapanuli Selatan	5,02	5,11
4	Tapanuli Tengah	5,08	5,12
5	Tapanuli Utara	4,81	4,12
6	Toba Samosir	4,55	4,8
7	Labuhanbatu	5,04	5,06
8	Asahan	5,57	5,64
9	Simalungun	5,24	5,4
10	Dairi	5,04	5,07
11	Karo	5,01	5,17
12	Deli Serdang	5,25	5,32
13	Langkat	5,03	4,98
14	Nias Selatan	4,46	4,48
15	Humbang Hasundutan	5,24	5,02
16	Pakpak Bharat	5,93	5,97
17	Samosir	5,77	5,27
18	Serdang Bedagai	5,05	5,14
19	Batu Bara	4,11	4,26
20	Padang Lawas Utara	5,94	5,96
21	Padang Lawas	5,74	6,06
22	Labuhanbatu Selatan	5,13	5,19
23	Labuhanbatu Utara	5,18	5,21
24	Nias Utara	5,49	4,59
25	Nias Barat	4,87	4,38
Kota/City			
71	Sibolga	5,65	5,15
72	Tanjung Balai	5,58	5,76
73	Pematang Siantar	5,24	4,86
74	Tebing tinggi	4,86	5,11
75	Medan	5,74	6,27
76	Binjai	5,40	5,54
77	Padang Sidempuan	5,04	5,29
78	Gunung Sitoli	5,39	6,03

Sumatera Utara	5,10	5,18
----------------	-------------	-------------

Sumber : Bps Sumatera Utara.

Berdasarkan tabel diatas seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 Kabupaten/Kota memiliki Laju Pertumbuhannya berbeda-beda dan berfluktuasi disetiap daerahnya, akan tetapi Kabupaten Mandailing Natal memiliki Laju Pertumbuhan yang stabil diangka enam koma persen. Pada tahun 2015 sebesar 6,22 persen, dan pada tahun 2016 daerah ini masih diangka enam, yaitu sebesar 6,20 persen. Artinya bahwa daerah Mandailing Natal laju pertumbuhan ekonominya masih sangat stabil dibandingkan daerah- daerah yang lain. Sedangkan pada Daerah Kota Medan Laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 Medan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 5,74 persen, akan tetapi pada dan pada tahun 2016 naik sebesar 6,27 persen. Akan tetapi masih banyak lagi daerah dikabupaten/kota diprovinsi sumatera utara laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang tinggi, sehingga membuat pemerintah harus berkerja keras lagi guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dan pendapatan asli daerahnya, guna untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Seokarwo, 2003). Dalam pelaksanaan otonomi tersebut pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah dalam kontek desentralisasi, daerah provinsi memiliki wewenang sebagaimana pemerintah pusat, wewenang tersebut antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan kepala daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. (Bambang Prakoso, 2005). Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam Pendapatan Daerah adalah (PAD), Dana Perimbang, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah pada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya sendiri.

gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. (Sulistyorini, 2004).

Kondisi daerah yang selama ini terbiasa bergantung pada pusat, kurang memiliki kemampuan alokatif yang memadai. Dengan kata lain, ketidak mampuan daerah untuk mengalokasikan dana secara efisien, akan menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Ada fakta yang tidak bisa disangkal, bahwa bila hanya ditinjau dari pendapatan asli daerah (PAD), sedikit sekali dari kabupaten atau kota yang mampu membiayai keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat mengharapkan dana perimbangan yang besarnya antar lain tergantung dari bagi hasil pajak dan kekayaan alam. Oleh karena itu, untuk masa-masa awal desentralisasi peranan pusat untuk menjaga keseimbangan horizontal melalui dana alokasi umum (DAU) diperkirakan akan tetap besar.

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat, dengan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti Pajak, Retsebusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana bangunan, pinjaman daerah, dan lain-lainnya, maka pendapatannya juga pasti banyak. Dalam hal ini kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung kepada kebijakan yang

diambil oleh pemerintah. Dengan tantangan yang semakin besar, pemerintah daerah harus lebih bisa mengelolah daerahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi penyelewengan, karena adanya otonomi membuat daerah tersebut menjadi tidak berkembang karena tidak mampu mengelolah sumber dana dan sumber dayanya sendiri akibat penyelewengan pemerintahnya sendiri . Pemberian kewenangan pusat terhadap daerah dalam mengelolah sumber –sumber daerah, termasuk didalamnya sumber dana nya harus dikelolah dengan baik.

Permasalahan terhadap kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan dan program-program yang dikeluarkan dan direncanakan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan provinsi Sumatera Utara, kebijakan dan program berfokus pada sumber-sumber pendapatan tradisional yang sudah ada maupun mencari sumber-sumber yang lain. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah memiliki permasalahan atau kendala yang signifikan tersendiri, permasalahan prinsip yang dimiliki oleh seluruh daerah otonom pada umumnya hampir seragam. Khusus Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara memiliki permasalahan dalam pengelolaan pendapatan.

Terbatasnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Luas wilayah pengelolaan pajak daerah, topografi yang berbukitan dan areal daratan (kurang lebih 70 %) dimanfaatkan untuk areal perkebunan dan sebagainya yang berdampak. Sulitnya masyarakat untuk memenuhi kewajibannya karena jarak tempuh ke kantor pelayanan sangat jauh. Kondisi umum kemampuan keuangan masyarakat yang sangat bergantung pada ekonomi makro, argumentasinya jika ekonomi masyarakat baik maka terbuka peluang target tercapai dan ini berkorelasi langsung dengan pengguna BBM. Banyaknya penjual dan pembeli kendaraan bermotor tidak melaporkan transaksi jual beli pada kantor samsat setempat, sehingga sulit untuk menjaring BBN-II, dan masih banyaknya pemilik beca

bermotor yang tidak memenuhi kewajibannya membayar PKB. Tinggi harga suku cadang dan pembiayaan pemeliharaan bermotor. Masih banyaknya pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak, dikarenakan kendaraannya ditarik oleh Leasing. Dengan kebijakan pemekaran, kendala yang dihadapi adalah kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia (SDM). (Dispendasu).

Dibalik tantangan yang besar terhadap pemerintah daerah untuk mengelolah keuangannya sendiri, pemerintah juga harus melihat hasil-hasil yang di peroleh dari daerahnya, karena pada dasarnya tidak semuanya pendapatan asli daerah (PAD) itu menjadi pendapatan terbesar bagi daerah, ini lah yang membuat terjadinya ketimpangan didaerah tersebut. Ketimpangan dalam berbagai hal yang membuat pemerintah daerah mengharapkan transfer dana yang lebih dari pusat. Ketimpangan- ketimpangan yang terjadi didaerah itu sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi berbicara mengenai masalah ketimpangan, negara ini sesungguhnya sedang mengalami proses ketimpangan yang tinggi, hal ini antara lain disebabkan oleh semakin banyaknya ketimpangan, baik itu ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan maupun ketimpangan kualitas institusi birokrasi dinegara ini. salah satu hasil study william easterly (2006) mengungkapkan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi merupakan penghambat dari kemakmuran, dan kesejahteraan tumbuhnya institusi yang berkualitas, dan berkembangnya pendidikan yang bermutu tinggi.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/kota, diantaranya 33 tersebut, terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara. Jadi pada setiap Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk mengelolah keuangan daerahnya masing-masing yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerahnya (PAD). Didalam setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masing-masing dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan

dilakukan oleh Pemerintah Daerah kedepannya, berapa besar biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari pendapatan pemerintah tersebut.

Maka dari posisi keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari APBD, merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pemerintah setiap tahun anggaran. Bisa kita lihat pada data pada tabel 1-2 dibawah ini yaitu :

Table 1-2
Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016 (Dalam Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota		Penerimaan		
		2014	2015	2016
Kabupaten/ Regency		(1)	(2)	(3)
1	Nias	44.641.875	63.227.700	69.414.470
2	Mandailing Natal	50.000.000	65.720.595	85.508.995
3	Tapanuli Selatan	77.252.840	98.438.746	90.666.249
4	Tapanuli Tengah	32.447.191	47.720.445	64.005.291
5	Tapanuli Utara	36.990.862	50.000.000	67.183.704
6	Toba Samosir	23.408.574	34.197.975	37.451.580
7	Labuhanbatu	85.350.446	14.629.0701	161.886.178
8	Asahan	59.129.772	71.255.889	104.816.668
9	Simalungun	110.000.000	112.414.289	119.980.275
10	Dairi	24.331.000	604.819.000	75.647.999
11	Karo	67.343.578	53.557.219	92.659.298
12	Deli Serdang	566.665.450	630.720.702	672.229.015
13	Langkat	114.868.164	110.900.351	115.313.352
14	Nias Selatan	76.559.502	50.640.920	14.110.807
15	Humbang Hasundutan	26.959.179	27.752.527	35.045.117
16	Pakpak Bharat	10.498.445	14.960.679	15.235.187
17	Samosir	23.773.379	26.595.698	30.786.029
18	Serdang Bedagai	61.004.294	72.418.621	89.259.944
19	Batu Bara	29.448.277	43.361.398	50.426.645
20	Padang Lawas Utara	23.736.362	26.315.846	32.165.959
21	Padang Lawas	34.250.618	40.117.300	49.991.247
22	Labuhanbatu Selatan	35.635.298	39.421.084	41.169.542
23	Labuhanbatu Utara	28.547.342	304.21.084	35.326.054
24	Nias Utara	15.000.000	30.00.0000	28.000.000
25	Nias Barat	10.000.000	20.000.000	24.000.000
Kota/City				
71	Sibolga	36.216.015	60.531.154	65.159.344
72	Tanjung Balai	34.409.306	5.940.728	63.898.624
73	Pematang Siantar	57.806.708	130.134.852	111.207.722

74	Tebing tinggi	47.477.336	67.190.406	86.115.554
75	Medan	1.515.685.947	1.679.237.163	1.827.196.828
76	Binjai	68.707.990	886.774.387	88.674.387
77	Padang Sidempuan	42.456.400	56.027.872	69.107.801
78	Gunung Sitoli	28.400.000	34.400.000	28.000.000
Sumatera Utara		3.499.002.150	4.089.547.297	4.541.639.863

Sumber : Bps Sumatera Utara

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkata atas Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) masing-masing. Dari tahun 2014 sampai 2016 total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara meningkat. Pada Tahun 2014 sebesar Rp. **3.499.002.150**, Tahun 2015 sebesar Rp. **4.089.547.297**, Dan pada akhirnya ditahun 2016 semakin tinggi pendapatannya sebersar Rp. **4.541.639.863**. Menurut Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara nilai Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi adalah di Kota Medan dengan nilai pendapatan Pada tahun 2014 sebesar Rp. **1.515.685.947**, pada tahun 2015 sebesar Rp. **1.679.237.163**, dan pada akhirnya pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. **1.827.196.828**. Dan tingkat Pendapatan Asli Daerah terbesar setelah Medan adalah Deli Serdang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya, antara lain: Pada tahun 2014 sebesar Rp. **566.665.450**, pada tahun 2015 sebesar Rp. **630.720.702**, pada tahun 2016 sebesar Rp. **672.229.015**. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian didaerah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Tetapi ada Penerimaan Daerahnya yang masih Rendah, akan tetapi setiap tahunnya daerah tersebut mengalami peningkatan juga, tetapi hanya beberapa persen saja, dari Kabupaten/Kota yang lain dari Penerimaan Asli Daerahnya, Yaitu Kabupaten Pakpak Bharat, daerah tersebut masih rendah penerimaan daerahnya, Pada tahun 2014 sebesar Rp. **10.498.445**, pada tahun 2015 sebesar Rp. **14.960.679**, dan pada tahun yang terakhir tahun 2016 pakpak bharat hanya memperoleh penerimaan dari daerahnya sebesar Rp. **15.235.187**.

maka dari data diatas bisa kita liat bahwa sanya Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara ini kaya akan Penerimaan Asli Daerahnya, tetapi belum mampu membiayai keuangannya sendiri, dan masih mengharapkan transfer dana dari pusat.

Walaupun demikian dari uraian data dan analisa data diatas masih banyak daerah yang mengalami ketimpangan di setiap daerah, artinya bahwa daerah itu masih baru (pemekaran) sehingga daerah masih membutuhkan berbagai bidang pendapatan, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Sehingga dengan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing belum tercukupi untuk membiayai daerahnya, sehingga pemerintah daerah mengharapkan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini yang membuat ketimpang disuatu daerah tinggi, dan membuat penduduk masyarakat didaerahnya menjadi tidak makmur dan sejahtera dikarenakan tinggi tinggat ketimpangan disuatu daerah tersebut.

Dengan tingginya ketimpang disuatu daerah yang menyebabkan lambatnya perhatian pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah daerah berusaha untuk membentuk daerah sendiri, atau daerah baru. Agar masyarakat tersebut dapat diperhatikan, oleh sebab itu munjullah ide masyarakat untuk memekarkan daerahnya. Pemekaran daerah merupakan sebuah aspirasi masyarakat untuk kemajuan daerahnya sendiri dimana daerah otonom baru mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus pemerintah agar rendang kendali dapat mempercepat proses pembangunan didaerah yang dimekarkan. Pada dasarnya pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyaraat. Maka pembangunan harus dilaksanakan secara kelanjutan, berencana dan juga perlu didukung oleh semua unsur masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila masyarakat dapat diberdayakan semaksimal mungkin (Sabarno, 2008)

Pemekaran wilayah di Kabupaten/Kota yang begitu pesat di Provinsi Sumatera Utara, telah menambah jumlah Kabupaten/Kota menjadi 25 kabupaten/kota, 8 kota dengan ibukota

provinsinya Medan. Yang daerah tersebut mengelolah hasil alamnya dan kekayaannya sendiri, disamping itu mereka juga diharapkan meningkatkan pertumbuhannya dan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Dibalik pemekaran tersebut ada tantangan dan tanggung jawab yang besar yang diemban oleh daerah, dimana tidak semua daerah yang mekar langsung mengalami kemajuan secara langsung, akan tetapi pemerintah harus berkerja keras demi menghasilkan finansial yang tinggi dari Pendapatan Asli Daerahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tergiur untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisa Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota diProvinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat Ketidak merataan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Terjadinya fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah peneliti ini hanya akan membahas tentang Perkembangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara.

1.3.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara ?

2. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimana arah perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Peneliti

1.4.1. Tujuan Peneliti

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis perkembangan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan regional pantai barat, pantai timur, dataran tinggi dan Mebidangro Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Melakukan analisis Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan regional pantai barat, pantai timur, dataran tinggi dan Mebidangro Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Melakukan analisis .

1.4.2. Manfaat Peneliti

Adapun dari manfaat penelitian ini diharapkan dapat diambil dari manfaat bagi pihak-pihak maupun kalangan masyarakat umum. Manfaat yang kiranya yang dapat diambil diantaranya :

- 1. Manfaat Akademik :** penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan yang melakukan penelitian selanjutnya, relevan lagi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
- 2. Manfaat Non Akademik :** peneliti ini dapat menjadi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Utara sebagai bahan masukan dalam merumuskan Penerimaan Daerah sehingga diharapkan kedepannya menjadi perhatian yang lebih dalam pengambilan strategi dalam meningkatkan Penerimaan Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Teori Penerimaan Negara

Penerimaan Negara merupakan penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Penerimaan negara baik dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri sangat penting bagi keberhasilan proses pembangunan nasional, terutama penerimaan pemerintah dari dalam negeri yaitu berupa penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan ini digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah dan sisanya akan menjadi tabungan pemerintah. Kelebihan dana tersebut yang kemudian akan menjadi sumber pembangunan apabila tidak tersedia, maka pembangunan harus dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Sumber-sumber Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (Suparmoko, 1986).

a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan dapat dikelompokkan atas beberapa jenis, Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan masih banyak lagi pajak yang lain-lainnya. Penerimaan pajak perdagangan internasional merupakan penerimaan yang terdiri dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor dan impor. Sehingga pendapatan

negara ini masih mendominasi atau masih bertumpuh pada penerimaan perpajakan dan pajak perdagangan Internasional. (Agung, 2011)

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara bukan pajak ini merupakan penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan yang diperoleh dari sumber daya alam, laba Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Alam, terdiri dari Migas (Minyak bumi dan Gas alam) dan Nonmigas (Pertambangan umum, kehutan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya) ini lah sumber penerimaan negara yang masih mendominasi.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu penerimaan negara yang bukan pajak, Menurut UU No. 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Dan penerimaan negara bukan pajak yang lain-lain (Agung, 2011).

2.1.2. Penerimaan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah, dan perundang-undangan pemerintah. Untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai roda organisasi pemerintah daerah. (Kuncoro, 2014).

Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa pendapatan yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Secara umum Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah. Pajak Daerah merupakan pungutan yang

dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Pajak daerah ini dibedakan dalam dua kategori yaitu yang pertama : pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah . yang kedua : penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lainnya. (Mahmudi, 2010)

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah Pajak Daerah. Bahkan untuk beberapa Daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi dari pada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi ini disebut sebagai *user charge*, *user fees* atau *chargingfor service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Oleh karena itu terdapat ada tiga jenis retribusi daerah yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. (Mahmudi, 2010)

c. Perusahaan Daerah

Dalam kebanyakan kasus, kontribusi bagi laba perusahaan daerah belum memberikan andil yang cukup signifikan bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).bahkan beberapa perusahaan daerah justru membebani Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena harus terus disubsidi sementara laba yang dihasilkan relatif masih rendah sehingga belum bisa memberikan deviden yang berarti bagi daerah. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukannya upaya peningkatan profesionalisme, efisiensi, profitabilitas, dan bahkan privatisasi perusahaan daerah. (Mahmudi, 2010)

d. Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebagai berikut : (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. (2) Jasa giro. (3) Pendapatan bunga. (4) Tuntutan Ganti rugi. (5) Komisi. (6) Potongan. (7) Keuntungan selisih kurs. (8) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. (9) Pendapatan denda Pajak dan Retribusi. (10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. (11) Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. (12) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. (Mahmudi, 2010)

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana yang telah ditetapkan Undang- Undang No. 25 Tahun 1999 (Kuncoro). Sebagaimana telah disinggung dibagian nawak bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan keuanfan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi pemerintah daerah. Dana perimbangan diklafikasikan menjadi tiga

bagian utama yaitu (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus. Dan Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil

Pemerintah daerah masih dapat mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan melalui dana bagi hasil. Dana bagi hasil pada dasarnya terdiri dari dua jenis, : yaitu bagi hasil pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil sumber daya alam (*natural resources sharing*) yaitu sebagai berikut :

A. Dana bagi hasil pajak meliputi :

- 1) Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Bagi Bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- 3) Bagi hasil dari pajak penghasilan pasal 25 dan 29 serta PPh wajib pajak orang pribadi pasal 21.

B. Dana bagi hasil Sumber daya Alam meliputi :

- 1) Bagi hasil dari iuran hak pengusaha hutan
- 2) Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan
- 3) Bagi hasil dari dana reboisasi
- 4) Bagi hasil dari iuran tetap (*Land-rent*)
- 5) Bagi hasil dari iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalti*)
- 6) Bagi hasil dari pungutan perusahaan perikanan
- 7) Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan
- 8) Bagi hasil dari pertambangan Minyak Bumi
- 9) Bagi hasil dari pertambangan Gas Bumi
- 10) Bagi hasil dari pertambangan Pasir Bumi
- 11) Bagi hasil dari pertambangan Umum. (Mahmudi, 2010)

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi keputusan khusus, sebagaimana yang telah ditetapkan UU No. 25 Tahun 1999. Oleh karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik didaerah yang jauh dari kota (terpencil) yang tidak memiliki akses untuk kedaerah yang lain.
- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik didaerah yang menampung transmigrasi.
- c. Kebutuhan dan sarana yang memadai
- d. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik didaerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan

Adapun persyaratan untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

- a. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, sumber daya alam, dana alokasi umum, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
- b. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan .
- c. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor yang ditetapkan oleh menteri teknis.

Kegiatan-kegiatan dana alokasi khusus PPNo. 104/2000, meliputi :

- a. Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan jangka ekonomi yang panjang.

- b. Dalam keadaan tertentu , dana alokasi khusus dapat membantu membiayai pengoperasian dan memelihara sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke provinsi, kabupaten dan kota, yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No. 22 tahun 1999. Diperkenalkannya dana alokasi khusus dan umum berarti menghapus subsidi daerah otonom dan dana inpres yang dikenalkan pada era presiden kedua Suharto. Dana alokasi umum merupakan block grant yang diberikan pada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan anatar kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan distribusi dengan formula berasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari daerah yang kaya. Tujuan penting dana alokasi umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah diseluruh indonesia.

4. Lain – Lain Pendapatan yang Sah

Lain- laian pendapatan yang sah adalah pendapatan yang lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta daerah-daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari : pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional. Dan menurut Simon Kuznet Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negeri (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkan.

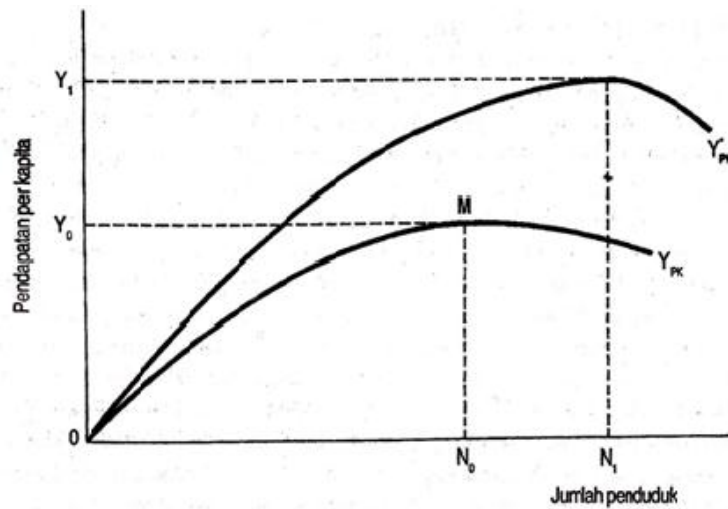
A. Teori Klasik Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776), teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands* (teori tangan-tangan gaib). Teori pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk
2. Pertumbuhan output total.

Menurut kaum Klasik Teori ini berlakunya TLDR (*The Law of Diminishing Return*) menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Jika dipaksakan, justru akan menurunkan tingkat output perekonomian, seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Optimal



Sumber : Raharja, Manurung, 2008.

Dalam gambar diatas 2.1, kurva Y menunjukkan hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat pendapatan. Kondisi optimal akan tercapai jika jumlah penduduk (tenaga kerja) yang terlibat dalam proses produksi adalah N_0 dengan jumlah pendapatan (PDB) adalah Y_0 . Jika jumlah penduduk (tenaga kerja) ditambah menjadi N_1 PDB justru bertambah menjadi Y_1 . Jika hal tersebut yang terjadi, maka pendapatan per kapita membaik. Hal itu dikarenakan pada gambar diatas dengan bergesernya kurva pendapatan (Y) ke jumlah penduduk JP_2 yang jumlah penduduk (tenaga kerja) bertambah akan meningkatkan pendapatan per kapita (PDB). (Jhingan, (2000), Rahardja, Manurung. 2008).

B. Teori Neo Klasik (*Neo- Classic Growth Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dan merupakan penyempurnaan teori- teori Klasik sebelumnya. Fokus pembahasan teori pertumbuhan Neo-Klasik adalah akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan

masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain adalah :

1. Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi).
2. Tingkat depresiasi dianggap konstan.
3. Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal.
4. Tidak ada sekror pemerintah.
5. Tingkat pertambahan jumlah penduduk (tenaga kerja) juga dianggap konstan.
6. Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk berkerja, sehingga jumlah penduduk = jumlah tenaga kerja.

Jika Q = pendapatan per kapita (PDB), K = barang modal, L = jumlah penduduk (tenaga kerja) maka :

$$Y = f(k,l) \dots\dots\dots 2.1$$

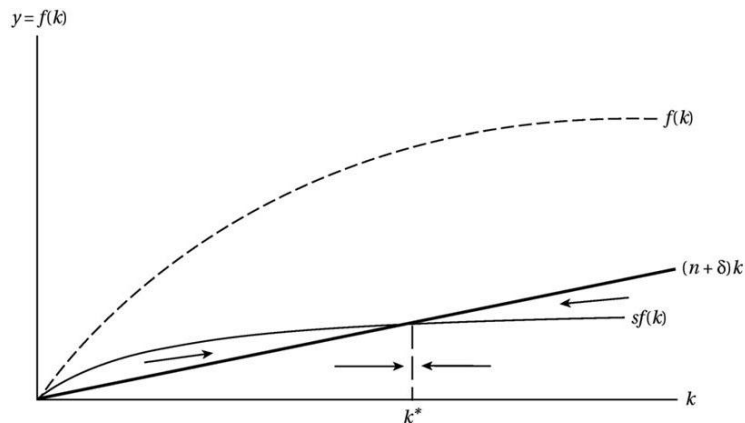
Dimana :

Y : pendapat perkapita (PDB) atau Q/L

K : barang modal perkapita atau K/L

Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka fungsi produksi perkapita adalah seperti tampak dalam gambar 2.2 dibawah. Bentuk kurva y yang parabolis menunjukkan terjadinya (TLDR). *The Law of Diminishing Return*

Gambar 2.2
Tingkat Pertumbuhan Stabil



Sumber : Rahardja, Manurung. 2008

Untuk menjaga agar perekonomian dapat mempertahankan tingkat outputnya, stok barang modal per kapita tidak boleh berkurang. Untuk itu tingkat investasi yang dilakukan harus mempunyai dua fungsi. :

1. Mengganti barang modal yang sudah usang. Jika tingkat depresiasi konstan adalah d per tahun, maka tingkat investasi untuk memenuhi fungsi ini adalah $d(K/L)$ atau dK .
2. Menambah stok barang modal sebagai respon terhadap penambahan tenaga kerja. Jika penambahan tenaga kerja konstan adalah n per tahun, maka tingkat investasi untuk memenuhi fungsi kedua adalah $n(K/L)$ atau nK . (Rahardja, Manurung. 2008)

Pertumbuhan ekonomi Solow membangun model alternatif terhadap jalan pemikiran Harrod-Domar dengan menghilangkan asumsi yang meragukan pada model yang terakhir ini. Model Harrod-Domar merupakan keseimbangan tajam dalam suatu sistem ekonomi jangka panjang: rasio tabungan, rasio modal output, dan laju kenaikan tenaga buruh merupakan parameter pokok.

Menurut Solow, keseimbangan yang dipetakan antara G_w dan G_n Harrod-Domar timbul dari asumsi pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap, suatu keadaan yang memungkinkan untuk menggantikan buruh dengan modal. Jika asumsi ini dilepaskan, maka keseimbangan G_w dan G_n akan hilang bersamaan. Solow membangun modelnya Adapun asumsi Solow yaitu :

- a. Ada satu komoditi gabungan yang diproduksi
- b. *Returns to scale*, bersifat konstan
- c. Harga dan upah fleksibel
- d. Kemajuan teknik bersifat netral
- e. Buruh dan modal dapat disubstitusikan satu sama lain

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Keynes menyatakan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. volume pekerjaan tergantung kepada permintaan yang efektif. permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. permintaan konsumsi tergantung pada cenderung untuk mengkonsumsi yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembati oleh investasi. jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun

sampai jurang tersebut terjembati. jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagai besar akan bergantung pada investasi (Jhingan, 2000)

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi, dan faktor non ekonomi (M.L. Jhingan (2000):

a. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh dan bangunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi tersebut. Adapun faktor- faktor produksi yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya alam,

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Bagi pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam yang melimpah merupakan yang sangat penting. suatu negara atau daerah yang kekuarang sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

2. Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu dapat dikatakan sebagai akumulasi modal, atau pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal.

3. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan

ekonomi, organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko diantara ketidak pastian.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting didalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuk yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan dengan cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, perubahan ini berkaitan dengan perubahan didalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan dari teknik peneliti baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh,modal, dan faktor yang lain.

5. Pembagian kerja

Spesialisasi pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri, maka dengan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

b. Faktor Non Ekonomi

Selain adanya faktor ekonomi, faktor non ekonomi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diseluruh daerah. Faktor non ekonomi terdiri dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut, :

1. Faktor Sosial.

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial.

2. Faktor Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung kepada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan kepada efisiensi mereka.

3. Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membatu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara atau pun daerah.

Dari faktor – faktor yang telah dikemukakan diatas, Profesor Kuznets (Todaro,2000) mengemukakan ada enam karakteristik proses pertumbuhan ekonomi. Yaitu : (1) tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. (2) tingkat kenaikan total produktivitas yang tinggi. (3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. (5) ada nya kecenderungan negara-negara (daerah) yang sudah maju perekonomiannya. (6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

2.1. Peneliti Terdahulu

Table 2-1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode	Variabel	Hasil Peneliti
1.	Sri Wahyuni, 2010.	Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah pasca Penerapan Otonomi di Daerah Kabupaten Bireuen Periode 2004-2010	OLS (Ordinary Least Square)	Dependen : Perkembangan Pendapatan. Dependen : Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daerah	Setelah ditetapkan Otonomi Daerah, pendapatan asli daerah meningkat, dan mampu menemukan potensi-potensi daerah.
2.	Novi Yanti, 2013.	Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang	OLS (Ordinary Least Square)	Dependen : Perkembangan Pendapatan. Dependen : Pendapatan Asli Daerah, APBD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi	Rasio keuangan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah, bahwa dengan perkembangan PAD yang meningkat dari tahun ke tahun membuat pertama Rasio kemandirian keuangan Daerah. Kedua Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan yang terakhir ke tiga Rasio Indeks Kemampuan Rutin.
3.	Keriahen Tarigan, 2011	Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap pendapat asli daerah dan sektor-sektor berpotensi yang dapat	OLS (Ordinary Least Square)	Dependen : Perkembangan pendapatan daerah Dependen : Pendapatan asli daerah,	Kota Medan sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Utara, pengaruhnya Otonomi daerah membuat pelaksanaan

		dikembangkan dipemerintah kota Medan		laba BUMD, DAU,DAK	perimbangan keuangan era otonomi daerah kota medan terdiri dari : pos bagi hasil pajak, pos bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dan pengaruhnya otonomi daerah secara statistik pada uji $\alpha = 5\%$ terhadap pendapatan asli daerah
--	--	--	--	-----------------------	--

Sumber: Jurnal dan Penelitian Terdahulu

2.2. Kerangka Konseptual

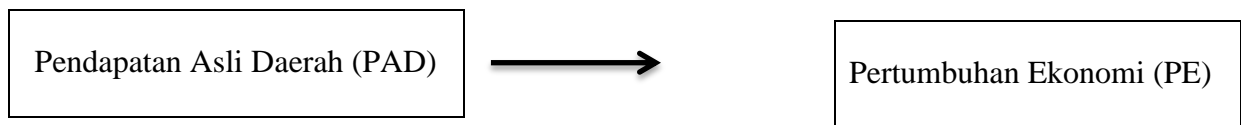
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Perkembangan dana-dana Penerimaan Daerah yang bersangkutan menunjukkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pada asas Desentralisasi yang dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan desentralisasi. Maka pemerintah daerah diberi wewenangan atas asas desentralisasi tersebut.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan Daerah atau pengeluaran pemerintah sebagai berikut : Dengan rumus pendapatan $Y = C + I + G$. Menyatakan bahwa $Y = C + by$ (besarnya konsumsi masyarakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat membuat pendapatan negara menjadi meningkat). Oleh sebab itu jumlah penduduk juga sangat berpengaruh besar

terhadap pendapatan daerah. Dengan rumus G (Government), besarnya Pengeluaran tergantung pada Penerimaan yang didapatkan, dan Penerimaan didapat dari dua sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pusat, sedangkan Anggaran dari Pusat itu terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana alokasi umum didalamnya juga mempengaruhi jumlah penduduk dan Dana Alokasi Khusus. Maka dari itu kerangka konseptual peneliti yang melihat dari Jumlah Penduduk dan Penerimaan Negara atau Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu negara atau daerah

Berdasarkan teori dan rumusan masalah penelitian maka, kerangka konseptual peneliti ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2-1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah pada bab satu, data yang dihimpun pada tahun 2014 sampai 2016 yang dipublikasikan pada Badan Pusat Statistik. Adapun peneliti ini yang akan dibahas atau diamati adalah Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2. Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi Operasional	Sumber Data
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Milyar Rupiah (RP)	BPS SUMUT
2.	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	.Perubahan nilai PDRB pada tahun t dibagi dengan t-1 dalam satuan persen (%)	BPS SUMUT
3.	Jumlah Penduduk (JP)	Total Jumlah Penduduk yang ada di Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam satuan (jiwa)	BPS SUMUT

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitaian ini dilakukan di Indonesia dengan melihat data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang telah disediakan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Utara yang terletak di Medan.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini telah direncanakan pada waktu masuk semester tujuh dan lebih terfokusnya pada bulan Desember 2017 sampai Februari 2018 selama tiga bulan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Kualitatif. Dimana peneliti akan menganalisis data-data Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Dan sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari situs-situs resmi (*website*). Seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Jurnal-jurnal, dan yang lainnya yang bersangkutan dengan judul peneliti ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghimpun Data Sekunder yang mana data Sekunder ini yang sudah ada atau yang sudah dipublikasikan oleh situs-situs yang resmi (*wibsite*) yang terpercaya seperti BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2012 sampai 2016.

3.6. Tahapan Analisis Data

Karena peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka prosedur penelitian sebagai berikut :

3.6.1. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskripsif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perkembangan daerah-daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam mengelolah Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2012-2016.

1. Analisis Deskriptif Perkembangan Pendapatan Asli Daerah.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dari angka Perkembangan Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Kabupaten dan Kota dalam tahun 2014-2016.

Analisis deskriptif Pendapatan Asli Daerah dapat dibagi menjadi empat daerah/ region yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Mebidangro, dan Dataran Tinggi. dari keempat tersebut akan dianalisis berdasarkan daerahnya.

2. Analisis Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perkembangan Petumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Kabupaten dan Kota dalam tahun 2014-2016.

Analisis deskriptif Pertumbuhan Ekonomi dapat dibagi menjadi empat daerah/ region yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Mebidangro, dan Dataran Tinggi. dari keempat tersebut akan dianalisis berdasarkan daerahnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

4.1.1. Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara yang berada dibagian barat Indonesia, terletak anatar garis 10 – 40 Lintang Utara 980 – 1000 Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 km² atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia, dengan posisi geografis antara 10 – 40 LU dan 980 – 1000 BT. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudera Hindia di sebelah Barat, serta Selat Malaka di sebelah Timur. Letak geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

4.1.2. Luas Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.620,70 km², atau berkisaran 9,23% dari total luas Sumatera Utara, di ikuti Kabupaten Langkat dengan luas 6.263,29 km², kemudian Kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 km² atau berkisaran 6,12%. Sedangkan luas Daerah terkecil adalah kota Sibolga dengan luas 10,77 km² atau berkisaran 0,02% dari total luas wilayah Sumatera Utara.

4.1.3. Topografis Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12 % seluas 65,51% seluas 8,64 % dan diatas 40 % seluas 24,28 %, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 Ha atau 1,57 %. Berdasarkan Topografi Daerah Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km² atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah Daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan dataran tinggi. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km² atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, yang sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa 2 danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

4.1.4. Kondisi Iklim Provinsi Sumatera Utara

Karena terletak garis Khatulistiwa. Provinsi Sumatera Utara tergolong kedalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebageian daerahnya datar, hanya beberapa meter diatas permukaan laut, beriklim cukup panas bias mencapai 33 C. Sebahagain daerah berbukit dengan kemiringan

yang landai beriklim sedang dan sebahagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bias mencapai 15 C. Sebagaimana Provinsi liannya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim hujan.

4.2. Analisis Deskriptif

4.2.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara 2012-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan undang-undang daerah yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama penghasilan daerah, Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat daerahnya.

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah pendapatan daerahnya yang berbeda-beda, ada yang kaya akan pendapatan dan ada juga yang rendah dalam pendapatan sehingga daerah tersebut mengharapkan transfer dana dari pusat. Akan tetapi, daerah yang kaya akan pendapatan daerahnya itu lebih maju dan sejahtera masyarakatnya dibandingkan daerah yang rendah akan pendapatan.

Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang dipublikasikan langsung oleh Badan Pusat Statistik Sumut, merinci PAD atas:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah.

Pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota menjadi membagi empat bagian di daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu :

- Pantai Barat terdiri dari 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Pantai Timur terdiri dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Dataran Tinggi terdiri dari 3 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Mebidangro terdiri dari 4 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara

Dari ke-empat bagian-bagian (Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Mebidangro) tersebut akan di jelaskan berdasarkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan diolah menjadi Grafik yaitu sebagai berikut :

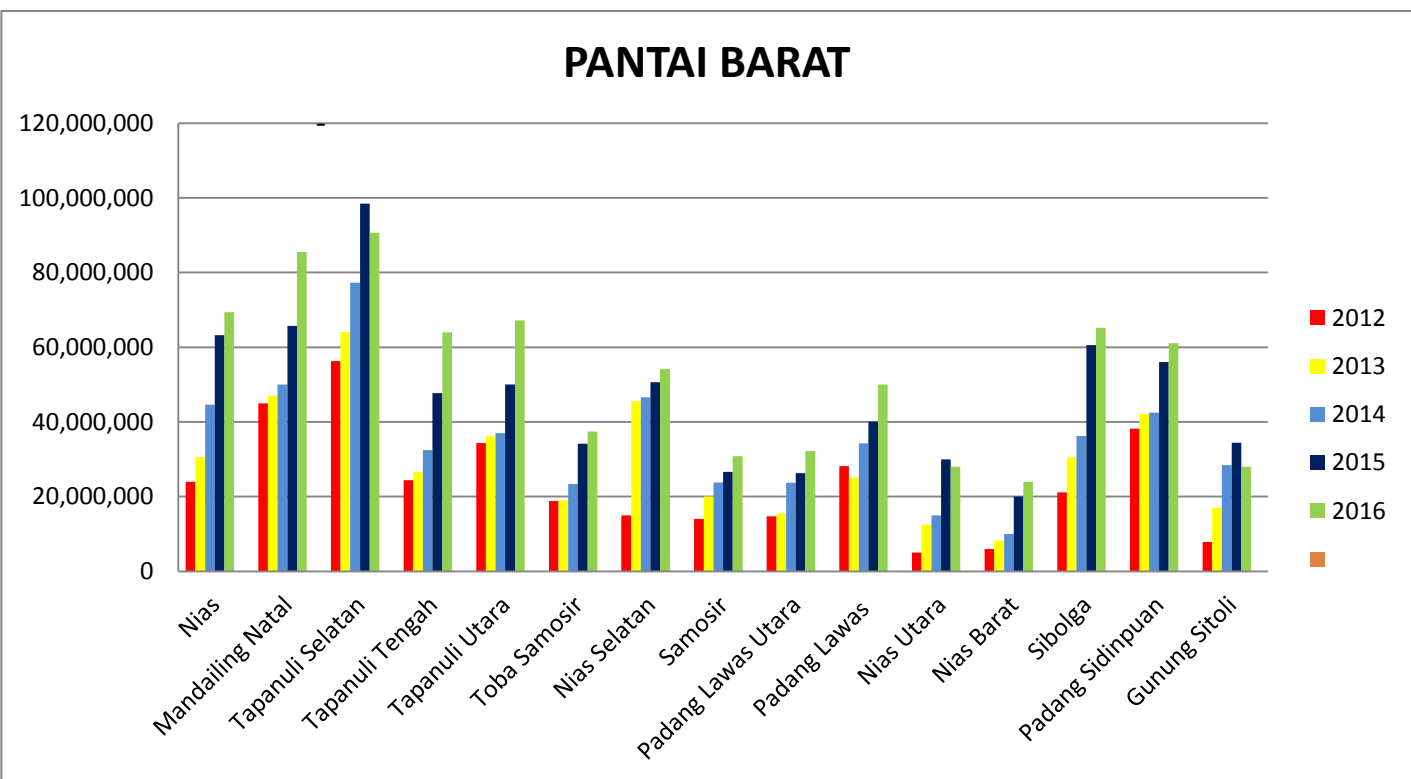
1. Kabupaten dan Kota yang berada di Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten dan Kota, dan terdiri dari 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara di bagian Pantai Barat.

Daerah yang berada di Pantai Barat memiliki Pendapatan Daerah yang berbeda-beda dan memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda juga, maka oleh sebab itu penulis akan menjelaskan perkembangan Pendapatan Asli Daerah di bagian pantai barat Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.1

Pendapatan Asli Daerah di Pantai Barat Sumatera Utara



Sumber: Data Bps dan diOlah

Dari Gambar Grafik 4.1 diatas bisa dilihat dengan jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara bagian Pantai Barat memiliki peningkatan pendapatan daerahnya setiap tahun. Pendapatan tersebut diperoleh dari Kekayaan-kekayaan alam, Retribusi, Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan yang sah lainnya, dimiliki daerahnya masing-masing.

Dapat dilihat jelas pada Kabupaten Nias, pada grafik tersebut angka Pendapatan Asli Daerah Nias dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 senilai Rp24.008.498, tahun 2013 senilai Rp30.532.790, tahun 2014 senilai Rp44.641.875, tahun 2015 senilai Rp63.227.700, tahun 2016 senilai Rp69.414.470, yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan majunya perekonomian di Kabupaten Nias.

Pada Kabupaten Mandailing Natal angkat Pendapatan tersebut hanya beberapa persen saja, akan tetapi tahun terakhir mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan. Tahun 2012 senilai Rp45.000.000, tahun 2013 senilai Rp47.000.000, tahun 2014 senilai Rp50.000.000, tahun 2015 senilai Rp65.720.595, tahun 2016 senilai Rp85.508.995.

Pada Kabupaten Tapanuli Selatan angka Pendapatannya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten yang lain di bagian Pantai barat, yaitu pada Tahun 2012 senilai Rp56.283.098, tahun 2013 senilai Rp64.086.813, tahun 2014 senilai Rp77.252.840, tahun 2015 senilai Rp. 98.438.746, dan pada tahun 2016 senilai Rp90.666.249.

Pada Kabupaten Nias Utara dan Barat ini adalah Kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang terendah dari Kabupaten dan kota di bagian Pantai Timur Sumatera Utara, karena Kabupaten tersebut baru pemekaran dari Kabupaten Nias, sehingga Kabupaten tersebut masih mengharapkan transfer dana dari pusat. pada Kabupaten Nias Utara tahun 2012 senilai Rp5.000.000, tahun 2013 senilai Rp12.500.000, tahun 2014 senilai Rp15.000.000, tahun 2014 senilai Rp20.000.000, dan tahun 2016 senilai Rp28.000.000. dengan pendapatan yang kecil Nias Utara masih mengharap transfer dana. Pada Kabupaten Nias Barat juga memiliki pendapatan yang kecil bahkan lebih kecil dari Nias Utara. Nias Barat tahun 2012 senilai Rp6.000.000, tahun 2013 senilai Rp8.200.000, tahun 2014 senilai Rp10.000.000, tahun 2015 senilai Rp20.000.000, dan tahun 2016 senilai Rp24.000.000. walaupun angka pendapatan dikatakan meningkat Nias Barat masih mengharapkan transfer dana.

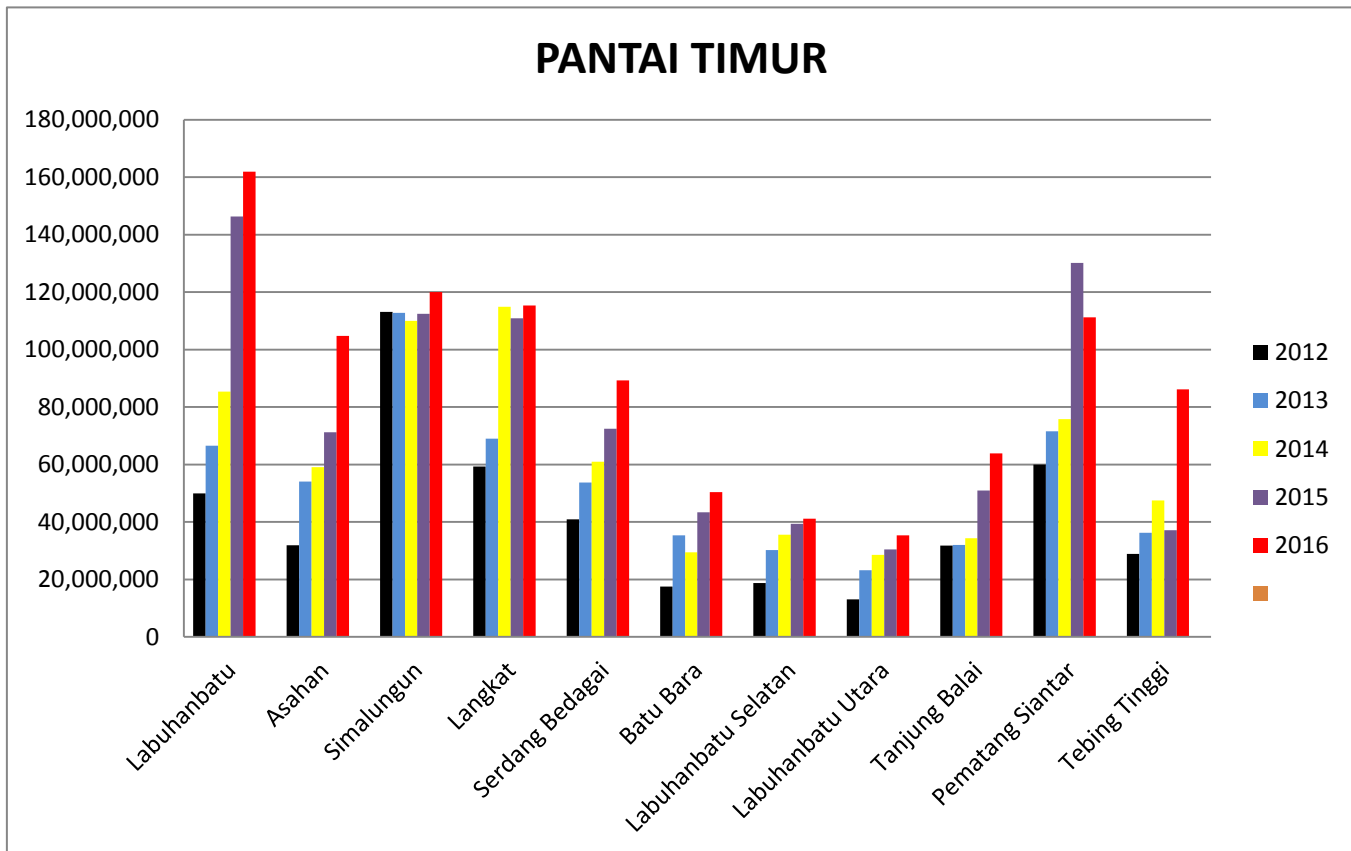
Inilah yang terjadi apa bila suatu daerah tidak mampu mengemban tanggung jawab daerahnya sendiri, sehingga daerah masih bergantung pada pusat. dengan adanya otonomi daerah yang sudah ditetapkan undang-undang seharusnya daerah harus mampu bangkit dalam mengelolah sumber daya alam dan manusianya guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan perekonomian suatu daerah pun menjadi meningkat dan bisa bersaing dengan daerah-daerah yang maju dalam perekonomian.

2. Kabupaten dan Kota yang berada di bagian Pantai Timur Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten dan Kota, dan terdiri dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara di bagian Pantai timur. Daerah yang berada di Pantai Timur memiliki Pendapatan Daerah yang berbeda-beda dan memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda juga, maka oleh sebab itu penulis akan menjelaskan perkembangan Pendapatan Asli Daerah di bagian pantai timur Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.2

Pendapatan Asli Daerah bagian Pantai Timur Sumatera Utara



Sumber: Data Bps dan diolah

Berdasarkan pada grafik 4.2 diatas dapat dilihat jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara bagian Pantai Barat memiliki peningkatan pendapatan daerahnya setiap tahun. Pendapatan tersebut diperoleh dari Kekayaan-kekayaan alam, Retribusi, Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan yang sah lainnya, dimiliki daerahnya masing-masing.

Daerah bagian Pantai Barat ini termaksud daerah yang memiliki kekayaan yang sama, sebab dari penghasil perkapita dan jumlah penduduk yang ada pada daerah ini sangat menyakinkan bahwa Pendapatan Asli Daerahnya banyak sehingga pemerintah daerahnya mampu membangun sarana dan prasarana untuk keperluan masyarakatnya. Dapat diketahui bahwa didaerah bagian pantai timur ini merupakan wilayah didalam

provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap dibandingkan wilayah lainnya.

Dapat dilihat ada Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sehingga Labuhanbatu mampu membangun daerahnya sendiri. Pada tahun 2012 senilai Rp50.000.000, tahun 2013 senilai Rp66.556.542, tahun 2014 senilai Rp85.350.446, tahun 2015 senilai Rp146.290.701, tahun 2016 senilai Rp161.886.178.

Pada Kabupaten Simalungun juga kabupaten yang luas dan memiliki pendapatan yang tinggi dibandingkan daerah lainnya sehingga daerah tersebut tidak mengharap transfer dana dari pusat. Tahun 2012 senilai Rp113.094.878, tahun 2013 senilai Rp63.738.494, tahun 2014 senilai Rp110.000.000, tahun 2014 senilai Rp112.414289, dan tahun 2016 senilai Rp119.980.275.

Pada Kabupaten Langkat memiliki Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 senilai Rp59.280.111, tahun 2013 senilai Rp68.971.555, tahun 2014 senilai Rp114.868.164, tahun 2015 senilai Rp110.900.351, tahun 2016 senilai Rp115.313.352.

Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara ini memiliki Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dibandingkan daerah-daerah yang lain, sehingga daerah tersebut masih butuh bantuan dari pusat guna membantu perekonomian daerahnya. Tahun 2012 senilai Rp13.064.552, tahun 2013 senilai Rp23.207.440, tahun 2014 senilai Rp28.547.342, tahun 2015 senilai Rp30.421.084, tahun 2016 senilai Rp35.326.054. Akan tetapi Labuhanbaru Utara memiliki angka yang signifikan.

Pada Kabupaten Batubara, kabupaten ini memiliki sumber alam yang tinggi dan memiliki pelabuhan Internasional, akan tetapi karena Batubara ini baru pecah dari

Kabupaten Asahan sehingga Batubara harus mengelolah Keuangan daerahnya sendiri, tahun 2012 senilai Rp17.589.568, tahun 2013 senilai Rp35.362.443, tahun 2014 senilai Rp29.448.277, tahun 2015 senilai Rp43.361.398, tahun 2016 senilai Rp50.426.645. Batubara memiliki pendapatan yang kecil dikarenakan kecilnya pertumbuhan ekonomi tersebut sehingga mereka masih meminta bantuan kepada pusat.

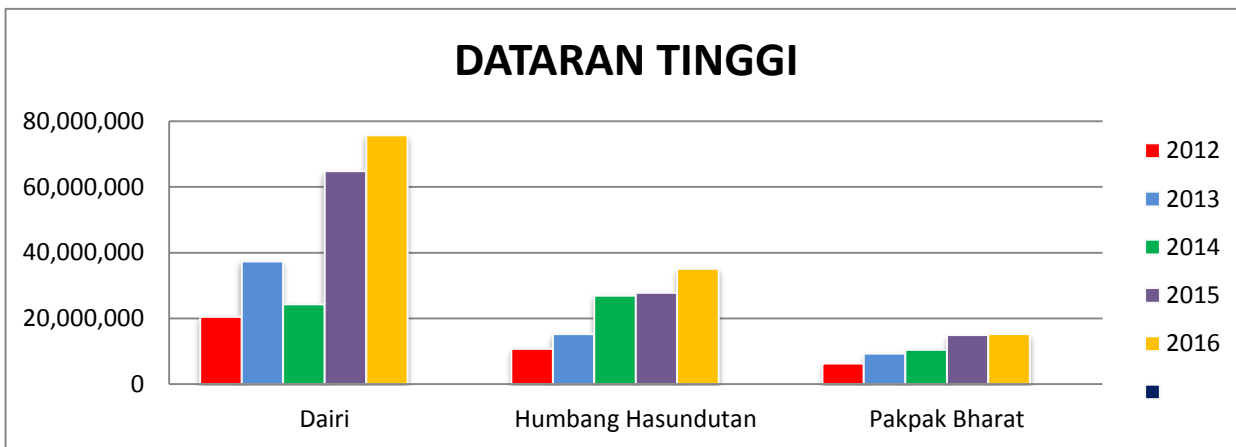
Pada Kota Tebing Tinggi, kota ini, dan saat ini Tebing dapat dikata sebagai kota yang memiliki jalan tol, tahun 2012 senilai Rp28.939.950, tahun 2013 senilai Rp36.272.920, tahun 2014 senilai Rp47.477.336, tahun 2015 senilai Rp67.190.406, tahun 2016 senilai Rp86.115.554. Tebing Tinggi memiliki pendapatan yang stabil dengan banyaknya sektor perekonomian di daerah tersebut.

3. Pendapatan Asli Daerah yang berada dibagian Daratan Tinggi Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten dan Kota, dan terdiri dari 3 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara di bagian Dataran Tinggi. Daerah yang berada di Dataran Tinggi memiliki Pendapatan Daerah yang berbeda-beda dan memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda juga, maka oleh sebab itu penulis akan menjelaskan perkembangan Pendapatan Asli Daerah di bagian Dataran Tinggi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.3

Pendapatan Asli Daerah Bagian Dataran Tinggi Sumatera Utara



Sumber: Data Bps diolah

Dari Gambar Grafik 4.1 di atas bisa dilihat dengan jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara bagian Pantai Barat memiliki peningkatan pendapatan daerahnya setiap tahun. Pendapatan tersebut diperoleh dari Kekayaan-kekayaan alam, Retribusi, Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan yang sah lainnya, dimiliki daerahnya masing-masing.

Daerah yang berada di dataran tinggi ini adalah daerah yang memiliki alam yang segar dalam kehidupan, dan memiliki alam yang bagus bagi perekonomian daerah tersebut, sebab daerah-daerah yang berada di dataran tinggi ini adalah lahan untuk membuka wisata-wisata alam yang indah, dengan adanya wisata tersebut maka pemerintah daerah akan menerima pendapatan yang real dari tempat wisata-wisata tersebut.

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa Kabupaten Dairi memiliki Pendapatan Asli Daerahnya tertinggi dari pada Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat, sebab Dairi ini adalah kabupaten yang sudah berdiri lama dan memiliki sektor perekonomian yang bagus. Kabupaten Dairi pada tahun 2012 memiliki Pendapatan

Asli Daerah senilai Rp20.508.000, tahun 2013 senilai Rp37.322.705, tahun 2014 senilai Rp24.331.000, tahun 2015 senilai Rp64.819.000, tahun 2016 senilai Rp75.647.999.

Pada Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 senilai Rp10.745.193, tahun 2013 senilai Rp15.212.701, tahun 2014 senilai Rp26.959.179, tahun 2015 senilai Rp27.752.527, dan pada tahun 2016 senilai Rp35.045.117.

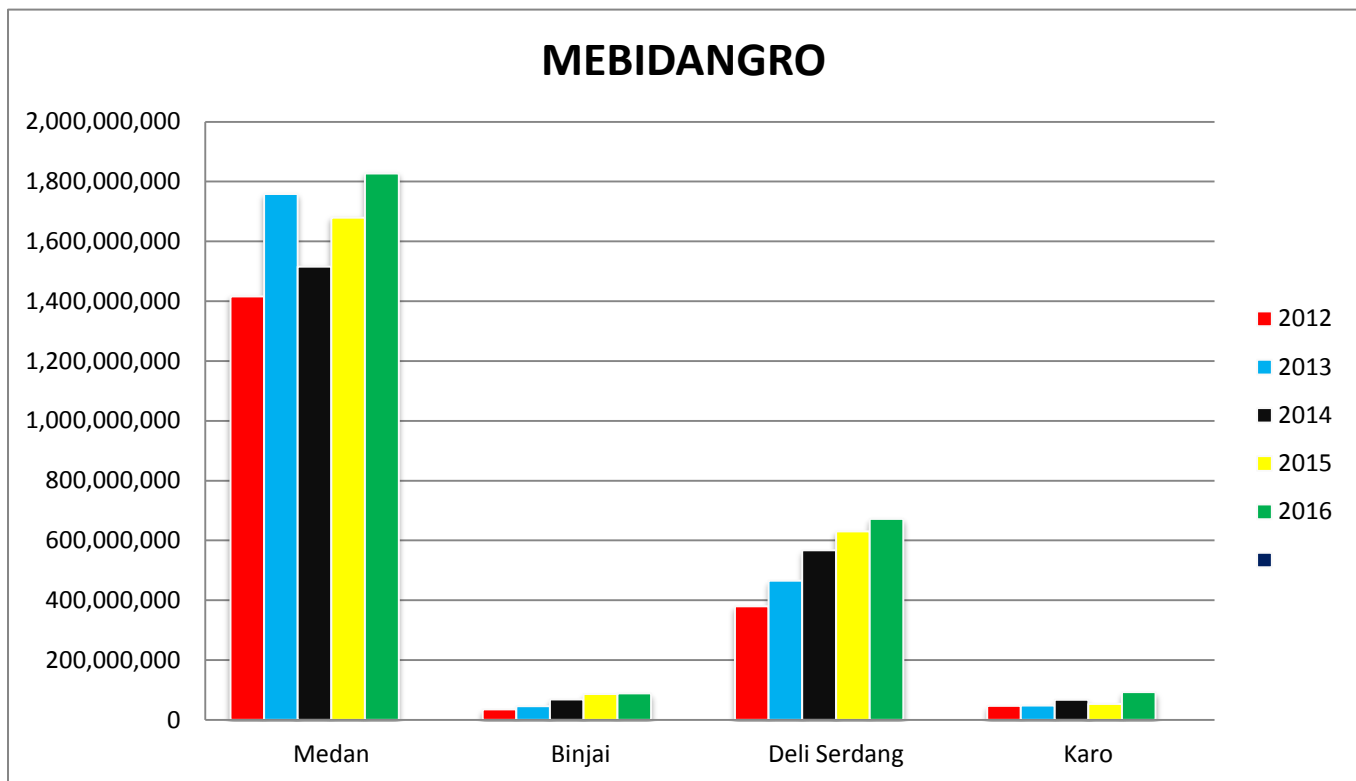
Pada Kabupaten Pakpak Bharat memiliki Pendapatan Asli Daerah lebih rendah, sebab tinggi ketimpangan distribusi pendapatan daerahnya. pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah senilai Rp6.270.625, tahun 2013 senilai Rp9.335.245, tahun 2014 senilai Rp10.498.445, tahun 2015 senilai Rp14.960.679, dan pada tahun 2016 senilai Rp15.235.187.

4. Pendapatan Asli Daerah yang berada dibagian Mebidangro Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten dan Kota, dan terdiri dari 4 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara di bagian Dataran Tinggi. Daerah yang berada di Dataran Tinggi memiliki Pendapatan Daerah yang berbeda-beda dan memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda juga, maka oleh sebab itu penulis akan menjelaskan perkembangan Pendapatan Asli Daerah di bagian Dataran Tinggi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.4

Pendapatan Asli Daerah Bagian Mebidangro Sumatera Utara



Sumber: Data Bps diolah

Dari Gambar Grafik 4.1 diatas bisa dilihat dengan jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara bagian Pantai Barat memiliki peningkatan pendapatan daerahnya setiap tahun. Pendapatan tersebut diperoleh dari Kekayaan-kekayaan alam, Retribusi, Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan yang sah lainnya, dimiliki daerahnya masing-masing.

Mebidangro ini adalah daerah yang paling aktif dalam roda perekonomian daerah Mebidangro, sebab pusat perekonomian berdekatan pada daerah tersebut sehingga masyarakat mudah mengakses berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian berbagai bidang sehingga daerah tersebut mampu berkerja sama dalam mengelolah sumber-sumber pendapatan yang ada.

Pada Kota Medan, inilah kota yang merupakan kota metropolitan dan kota terbesar dengan urutan ke 4 di Indonesia, dengan hal tersebut sektor-sektor perekonomian yang ada pada Kota Medan membuat Kota tersebut mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya tersebut. Disamping itu Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah Kota Medan senilai Rp1.416.229.173, tahun 2013 senilai Rp1.758.787.835, tahun 2014 senilai Rp1.515.685.947, tahun 2015 senilai Rp1.679.237.163, tahun 2016 senilai Rp 1.827.196.828. Dengan pendapatan yang tinggi kota medan tidak terlalu bergantung pada pusat, dengan sektor-sektor perekonomian yang ada membuat pendapatannya tinggi dan bisa membangun daerahnya.

Pada Kabupaten Deli Serdang Pendapatan Asli Daerah juga memiliki perekonomian yang mampu bersaing dengan kota medan dengan pendapatan yang tinggi. Kabupaten Deli Serdang tahun 2012 pendapatan asli daerahnya senilai Rp380.055.100, tahun 2013 senilai 465.000.000, tahun 2014 senilai Rp566.665.450, tahun 2015 senilai Rp630.720.702, tahun 2016 senilai Rp672.229.015.

Pada Kota Binjai Pendapatan Asli Daerahnya pada tahun 2012 senilai Rp35.179.200, tahun 2013 senilai Rp 46.139.626, tahun 2014 senilai Rp68.707.990, tahun 2015 senilai Rp86.774.387, dan tahun 2016 senilai Rp88.674.387.

Pada Kabupaten Karo, daerah ini sebenarnya masuk dalam daerah bagian dataran tinggi, akan tetapi karena masyarakat mebidang sering kekaro dan sebaliknya sehingga Pemerintah Karo menyetujui bagian dari Mebidangro. Pendapatan Asli Karo tahun 2012 senilai Rp46.826.147, tahun 2013 senilai Rp48.165.768, tahun 2014

senilai Rp67.343.578, tahun 2015 senilai Rp53.557.219, dan tahun 2016 senilai Rp92.659.298.

4.2.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan pembangunan dalam suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi didalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga di pengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk di suatu daerah. Sumber Daya Manusia merupakan indikator yang paling terpenting dalam proses pembangunan suatu daerah, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauhmana sumber daya manusia yang dimiliki.

Namun sumber daya manusia juga tidak bisa menjamin berlangsungnya pembangunan tanpa adanya faktor-faktor yang lain untuk mendukung pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, faktor pendukung hal itu adanya sumber daya alam yang siap dalam berbagai hal, seperti kekayaan material, kekayaan hasil hutan, kekayaan hasil laut dan lain sebagainya.

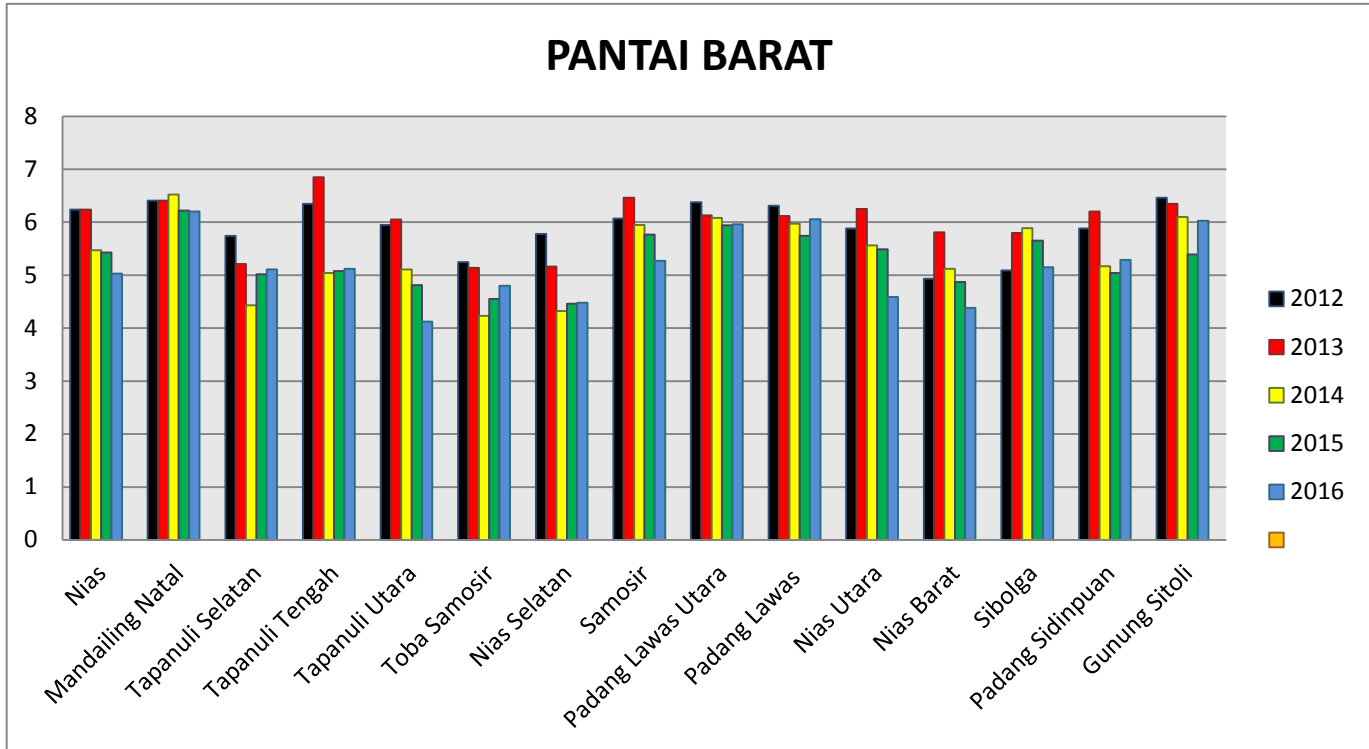
1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi yang berada dibagian Pantai Barat Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten dan Kota, dan terdiri dari 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara di bagian Pantai barat. Apabila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah tinggi, maka daerah tersebut makmur dan mampu

mensejahterakan rakyatnya. Maka oleh itu penulis akan menjelaskan Petumbuhan ekonomi didaerah-daerah bagian pantai barat Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.5

Pertumbuhan Ekonomi pantai barat Sumatera Utara



Sumber: Data Bps diolah

Dapat dijelaskan pada Grafik 4.5 diatas, bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara bagian pantai barat memiliki pertumbuhan yang stabil dapat dikatakan diatas 5% dan hal tersebut sudah mencapai kestabilan. Dapat dilihat pada Kabupaten Mandailing Natal memiliki pertumbuhan ekonomi tahun 2012 senilai 6.41%, tahun 2013 senilai 6.41%, tahun 2014 senilai 6.52%, tahun 2015 senilai 6.22%, dan pada tahun 2016 senilai 6.20%. Angka ini membuat Kabupaten Mandailing Natal memiliki sektor ekonomi yang bagus.

Pada Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga pada tahun 2012 Kabupaten Padang Lawas Utara senilai 6.38%, tahun

2013 senilai 6.13%, tahun 2014 senilai 6.08%, tahun 2015 senilai 5,94%, dan pada tahun 2016 senilai 5.96%.

Pada Kabupaten Toba Samosir memiliki Pertumbuhan ekonomi standar pada 4% pada tahun 2012 Toba Samosir senilai 5.25%, tahun 2013 senilai 5.14%, tahun 2014 senilai 4.23%, tahun 2015 senilai 4.55%, dan pada tahun 2016 senilai 4.80%. Toba Samosir memiliki Pertumbuhan ekonomi yang rendah dikarenakan sedikitnya sektor ekonomi.

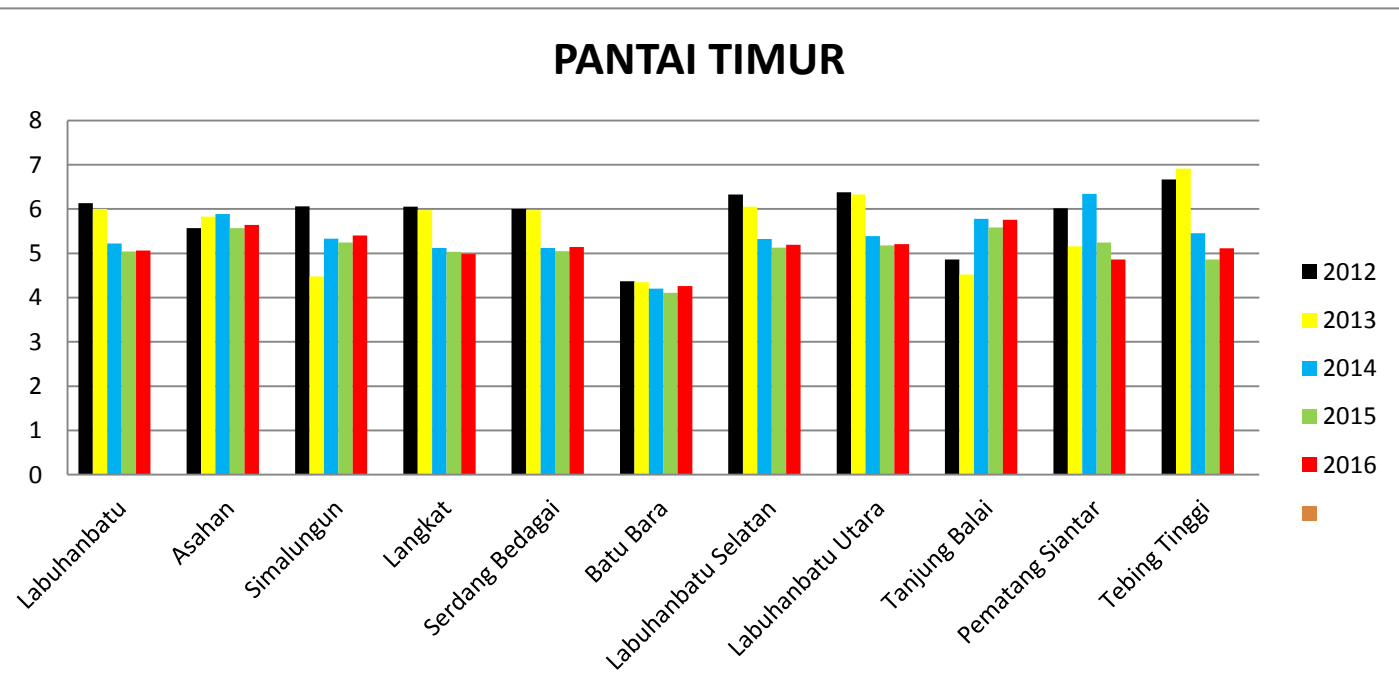
Pada Kota Gunung Sitoli, Kota yang berada dibagian pantai barat Sumatera Utara yang memiliki pertumbuhan yang bagus, Gunung Sitoli tahun 2012 senilai 6.46%, tahun 2013 senilai 6.35%, tahun 2014 senilai 6.10%, tahun 2015 senilai 5.39%, dan pada tahun 2016 senilai 6.03. Gunung Sitoli ini merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Nias, sehingga Pemerintah Daerah Gunung mampu membangkitkan sektor-sektor perekonomian yang di Gunung Sitoli.

2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi yang berada dibagian Pantai Timur Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten dan Kota, dan terdiri dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara di bagian Pantai Timur. Apabila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah tinggi, maka daerah tersebut makmur dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Maka oleh itu penulis akan menjelaskan Pertumbuhan ekonomi didaerah-daerah bagian pantai barat Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.6

Pertumbuhan Ekonomi daerah bagian Pantai Timur Sumatera Utara



Sumber: Data Bps diolah

Dengan Jelas pada Grafik 4.6 diatas dapat dilihat pada Kabupaten Asahan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, Kabupaten Asahan tahun 2012 senilai 5.57%, tahun 2013 senilai 5.83%, tahun 2014 senilai 5.89% tahun 2015 senilai 5.57%, tahun 2016 senilai 5.64%.

Pada Kabupaten Labuhanbatu memiliki pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 senilai 6.38%, tahun 2013 senilai 6.33%, tahun 2014 senilai 5.32%, tahun 2015 senilai 5.18%, dan pada tahun 2016 senilai 5.19%.

Pada Kota Tanjung Balai memiliki pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 senilai 4.86%, tahun 2013 senilai 4.52%, tahun 2014 senilai 5.78%, tahun 2015 senilai 5.58%, dan pada tahun 2016 senilai 5.76%.

Pada Kabupaten Batubara memiliki pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 senilai 4.37%, tahun 2013 senilai 3.35%, tahun 2014 senilai 4.20%, tahun 2015 senilai

4.11%, dan pada tahun 2016 senilai 4.26%. Kabupaten Batubara ini memiliki Pertumbuhan ekonomi yang rendah dari pada daerah-daerah lainnya.

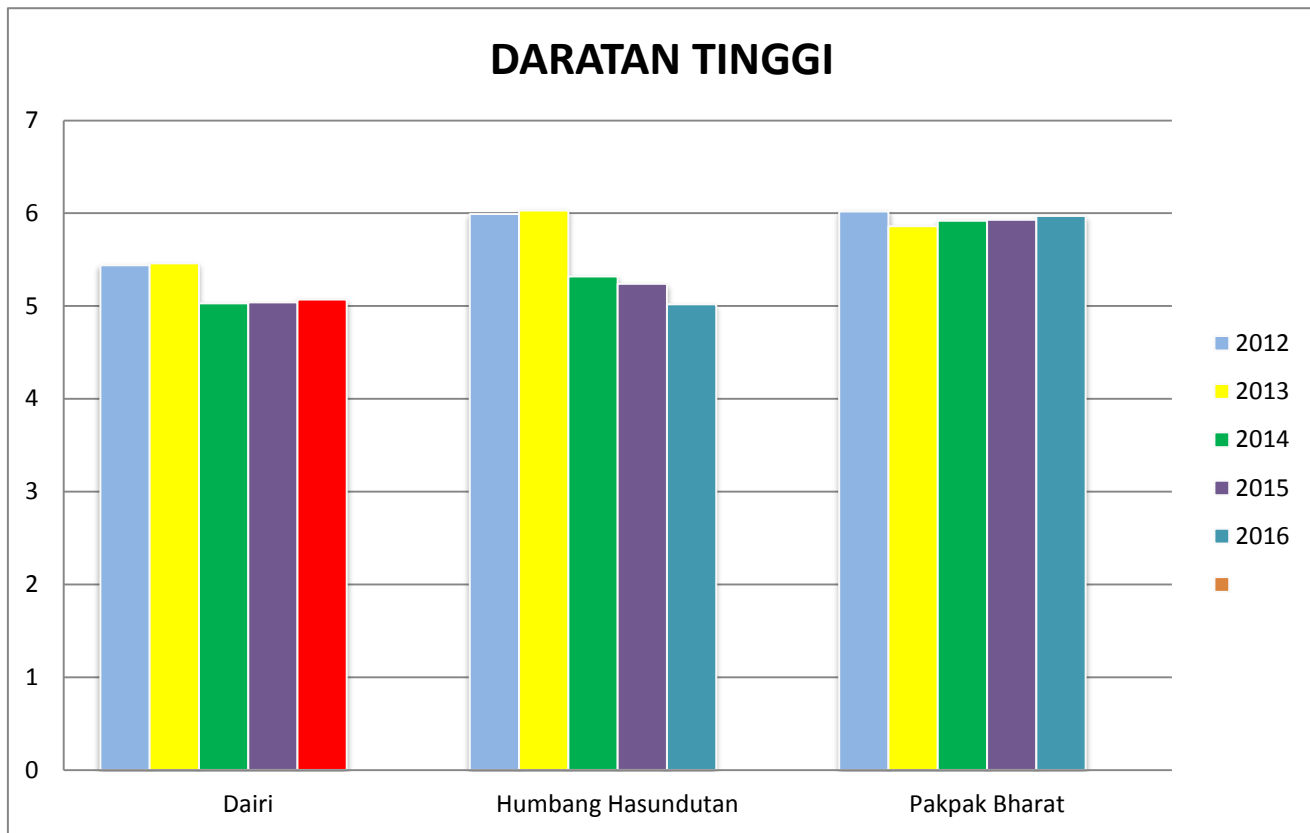
Pada Kabupaten Serdang Bedagai memiliki pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 senilai 6.00%, tahun 2013 senilai 5.97%, tahun 2014 senilai 5.12%, tahun 2015 senilai 5.05%, dan pada tahun 2016 senilai 5.14%. Kabupaten Sergai Bedagai memiliki Pertumbuhan ekonomi dengan sektor-sektor ekonomi yang bagus.

3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi daerah bagian dataran tinggi Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten dan Kota, dan terdiri dari 3 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara di bagian Pantai Timur. Apabila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah tinggi, maka daerah tersebut makmur dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Maka oleh itu penulis akan menjelaskan Pertumbuhan ekonomi didaerah-daerah bagian pantai barat Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.7

Pertumbuhan Ekonomi daerah dataran tinggi Sumatera Utara



Sumber: Data Bps diolah

Dapat dilihat pada grafik 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa daerah-darah yang berada didataran tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dan stabil, tidak rendah sehingga kemajuan pada daerah-daerah tersebut pesat.

Pada Kabupaten Dairi memiliki Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada tahun 2012 Kabupaten Dairi senilai 5.44%, tahun 2013 senilai 5.46%, tahun 2014 senilai 5.03%, tahun 2015 senilai 5.04%, dan pada tahun 2016 senilai 5.07%.

Pada Kabupaten Pakpak Bharat memiliki Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga pada tahun 2012 Kabupaten Pakpak Bharat senilai 6.02%, tahun 2013 senilai 5.86%, tahun 2014 senilai 5.92%, tahun 2015 senilai 5.93%, dan pada tahun 2016 senilai 5.97%.

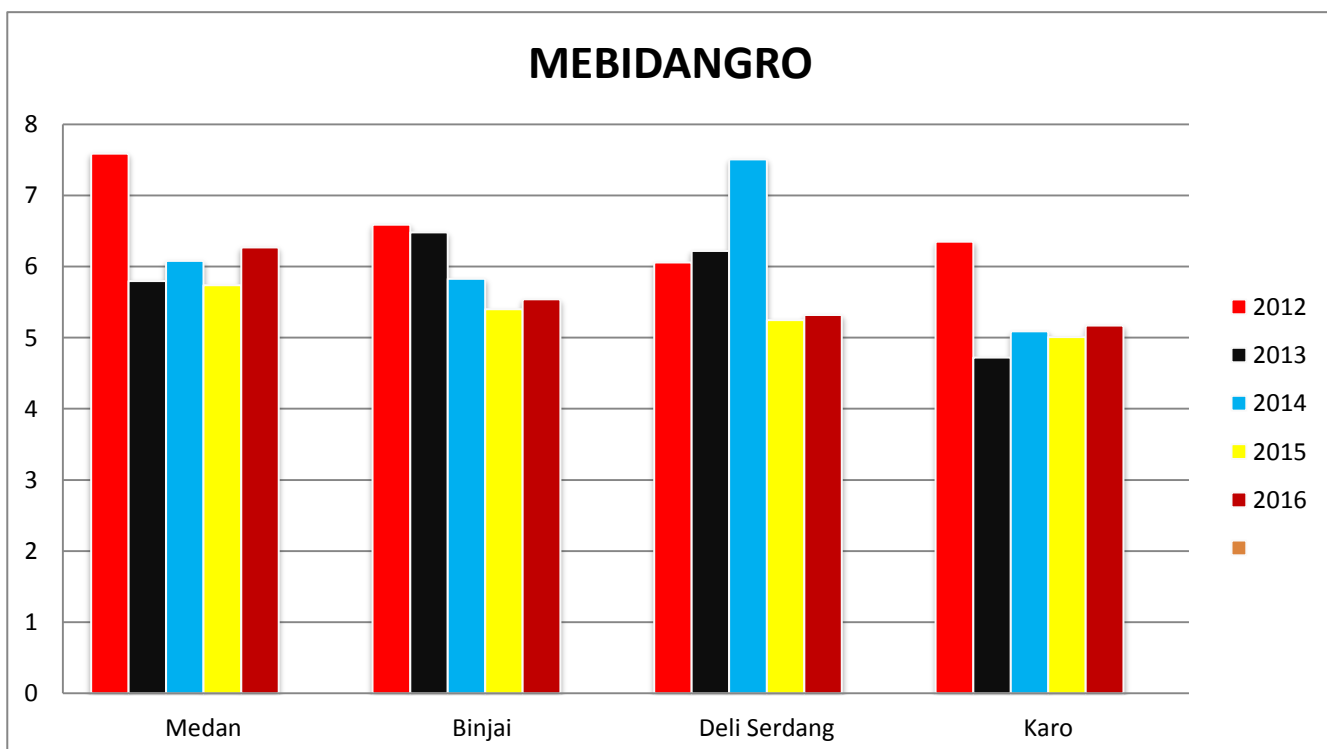
Pada Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga pada tahun 2012 Kabupaten Humbang Hasundutan senilai 5.99%, tahun 2013 senilai 6.03%, tahun 2014 senilai 5.32%, tahun 2015 senilai 5.24%, dan pada tahun 2016 senilai 5.02%.

4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi daerah bagian Mebidangro Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten dan Kota, dan terdiri dari 4 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara di bagian Pantai Timur. Apabila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah tinggi, maka daerah tersebut makmur dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Maka oleh itu penulis akan menjelaskan Pertumbuhan ekonomi didaerah-daerah bagian pantai barat Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.8

Pertumbuhan Ekonomi daerah Medangro Sumatera Utara



Sumber: Data Bps diolah

Dapat dilihat pada Grafik 4.8 diatas bahwa Mebidangro adalah daerah yang memiliki pergerakan perekonomian yang cepat, dan daerah yang memiliki sektor-sektor ekonomi yang mempuni dan mampu dialokasikan kepada daerahnya.

Pada Kota Medan adalah kota terbesar dan kota metropolitan di Indonesia sehingga dengan banyaknya sektor-sektor perekonomian membuat Medan maju, dan medan memiliki Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga pada tahun 2012 Kota Medan senilai 7.69%, tahun 2013 senilai 6.30%, tahun 2014 senilai 6.08%, tahun 2015 senilai 5.74%, dan pada tahun 2016 senilai 6.27%.

Pada Kabupaten Deli Serdang memiliki Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga dan merupakan Daerah yang memiliki sektor ekonomi yang tinggi, dan pada tahun 2012 Kabupaten Deli Serdang senilai 6.06%, tahun 2013 senilai 6.22%, tahun 2014 senilai 7.51%, tahun 2015 senilai 5.25%, dan pada tahun 2016 senilai 5.32%.

Pada Kabupaten Karo memiliki Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada tahun 2012 Kabupaten Karo senilai 6.35%, tahun 2013 senilai 4.72%, tahun 2014 senilai 5.09%, tahun 2015 senilai 5.01%, dan pada tahun 2016 senilai 5.17%.

Pada Kota Binjai memiliki Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada tahun 2012 Kota Binjai senilai 6.59%, tahun 2013 senilai 6.48%, tahun 2014 senilai 5.83%, tahun 2015 senilai 5.40%, dan pada tahun 2016 senilai 5.54%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki 4 bagian daerah-daerah yang sudah ditentukan pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Daerah bagian pantai barat Sumatera Utara terdiri dari 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara antara lain : Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli, Sibolga.
2. Daerah bagian pantai timur Sumatera Utara terdiri dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara antara lain : Labuhanbatu, Asahan, Batubara, Simalungun, Langkat, Sergai Begadai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi.
3. Daerah bagian daratan tinggi Sumatera Utara terdiri dari 3 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara antara lain: Dairi, Humbang Hasandutan, dan Pakpak Bharat.
4. Daerah bagian Mebidangro Sumatera Utara terdiri dari 4 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara antara lain: Medan, Deli Serdang, Binjai dan Karo.

Dari 4 bagian daerah ini Provinsi Sumatera Utara memiliki beragam sumber daya alam dan manusia yang melimpah, dari sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan lain-lainnya yang membuat daerah-daerah

tersebut mengelolah keuangan daerahnya sendiri dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus.

5.2. Saran

Saya sebagai penulis jurnal ini akan memberisaran kepada Pemerintah dan masyarakat yaitu :

1. Pemerintah, Kewajiban bagi pemerintah dalam mengelolah sumber daya alam yang dimiliki daerahnya, harus mampu digali dengan baik, sebab apabila daerah tidak mampu mengelolah daerahnya sendiri maka daerah tersebut tidak maju dan hanya mengharapkan bantuan dari pusat, sehingga daerah itu tidak mandiri. Pemerintah harus bisa mengelolah Pendapatan asli daerah dengan baik, dari pendapatan itulah yang membuat daerah maju dan makmur dalam hal saran dan pra sarana.
2. Masyarakat, sebagai sumber daya manusia kita harus bisa bersaing dan mengeluarkan kualitas kita untuk mengelolah daerah kita sendiri, guna untuk memajukan daerah ditangan pribumi bukan aseng. Masyarakat harus bisa berkerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian yang sudah diberi oleh pemerintah, sehingga sektor-sektor perekonomian berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sri Wahyuni, 2010. *Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah pasca Penerapan Otonomi di Daerah Kabupaten Bireuen Periode 2004-2010*. Jurnal Ilmiah Dosen Faklutas Ekonomi

Novi Yanti, 2013. *Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang*. Jurnal ilmiah Vol. I No.3. STIE Padang.

Keriahen Tarigan, 2011. *Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap pendapat asli daerah dan sektor-sektor berpotensi yang dapat dikembangkan dipemerintah kota Medan*. Jurnal ilmiah Alumnus S2 PWD SPs Universitas Sumatera Utara.

Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya, 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal ilmiah Vol 12, No 1. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Todaro, Michael P dan Smith, C. Stephen (2000). *"Pembangunan Ekonom kesebelas jilid 1"*. Penerbit Erlangga, Jakarta, Penterjema Agus Dharma

Mahmudi (2010). *"Manajemen Keuangan Daerah"*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. *" Otonomi Daerah"*. Menuju Era Baru Pembangunan Derah Edisi 3. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Guritno, Mangkoesobroto (1994). *"Ekonomi Publik Edisi ketiga"*. Penerbit PBFY Yogyakarta.

Afriefianto, Moch. Doddy, (2012). *" Ekonometrika", esensi dan aplikasi dengan menggunakan Eviews*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Gujarati *" Dasar-dasar ekonometrika"* Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.

M.L. JHINGAN, 2010 “ *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*” penerbit PT. RajaGrafindo Persaba, JAKARTA.

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus “*MakroEkonomi*” Edisi keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sadono Sukirno “*MakroEkonomi Teori Pengantar*” Edisi ketiga Penerbit, PT. RajaGrafindo Persaba, JAKARTA.

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung “*Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*” Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Mulyo Agung “*Perpajakan Indonesia*” Penerbit Lentera Ilmu Cendakia

Prof.M. Suparmoko “*Pengantar Ekonomi Makro*” Edisi lima Penerbit BPFE UGM

Badan Pusat Statisti (2015), *Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam angka tahun 2012 sampai 2016*. Sumatera Utara.

Badan Pusat Statistik (2015), *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Sumatera Utara.